



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD MASYKUR
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
3. NHK : 55222

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m²/100 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 135 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. Tanah Seluas 165 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m²/50 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/90 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA ASTREA STAR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.167.831.090**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.440.331.090

III. HUTANG Rp. 418.630.479



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.021.700.611

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.